

## PENGUNAAN LAHAN, DEGRADASI COMMONS, DAN RISIKO BANJIR DI INDONESIA: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA BENCANA SUMATERA 2025

Faisal Karim Jafar Khan Maskatie<sup>1</sup>, Ovalia Rukmana<sup>2</sup>  
[faisalkarimjkm@gmail.com](mailto:faisalkarimjkm@gmail.com)<sup>1</sup>, [ovalia.rukmana@bakrie.ac.id](mailto:ovalia.rukmana@bakrie.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Bakrie

### ABSTRAK

Aktivitas bisnis berbasis eksploitasi sumber daya alam memiliki keterkaitan erat dengan meningkatnya degradasi lingkungan di Indonesia, terutama ketika pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dijalankan secara substantif. Kajian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan CSR dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi. Fokus pembahasan diarahkan pada kontribusi aktivitas bisnis terhadap degradasi lingkungan, pola pelaksanaan CSR oleh perusahaan, serta faktor penyebab CSR belum mampu menekan dampak sosial dan ekologis yang muncul. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode yuridis normatif dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen relevan terkait praktik CSR dan pengelolaan lingkungan. Perspektif tragedy of the commons digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan kecenderungan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya bersama akibat lemahnya pengelolaan kolektif dan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia masih bersifat formalitas dan menekankan kepatuhan administratif serta pencitraan perusahaan. Program CSR umumnya jangka pendek, tidak berkelanjutan, dan tidak terintegrasi dengan kegiatan inti perusahaan sebagai sumber utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, CSR tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrumen perlindungan lingkungan tanpa dukungan regulasi tegas, penegakan hukum konsisten, serta pengelolaan sumber daya alam yang kolektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Tragedy Of The Commons, Degradasi Lingkungan, Eksploitasi Sumber Daya Alam, Akuntabilitas Korporasi.

### ABSTRACT

*Business activities based on natural resource exploitation are closely linked to increasing environmental degradation in Indonesia, particularly when Corporate Social Responsibility (CSR) is not implemented substantively. This study examines the effectiveness of CSR in preventing environmental damage caused by corporate activities. The analysis focuses on the contribution of business practices to environmental degradation, patterns of CSR implementation, and factors limiting CSR's capacity to mitigate social and ecological impacts. This study adopts a qualitative descriptive approach using normative juridical and conceptual methods. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, academic studies, and relevant documents on CSR practices and environmental management. The tragedy of the commons framework is applied to explain excessive exploitation of shared resources resulting from weak collective governance and law enforcement. The findings reveal that CSR in Indonesia remains largely formalistic, emphasizing administrative compliance and corporate image-building rather than sustainability. CSR initiatives are generally short-term, lack integration with core business activities, and fail to address the root causes of environmental degradation. Consequently, CSR cannot function as a standalone environmental protection instrument without strong regulation, consistent law enforcement, and collective, sustainable natural resource governance.*

**Keywords:** Corporate Social Responsibility, Tragedy Of The Commons, Environmental Degradation, Natural Resource Exploitation; Corporate Accountability.

## PENDAHULUAN

Ekspansi bisnis di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan telah mengubah fungsi ekologis wilayah Sumatera secara signifikan. Pembukaan hutan dalam skala besar mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyerap air, menjaga kesuburan tanah, dan menyeimbangkan iklim lokal. Eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu konsekuensi dari aktivitas ekonomi dan bisnis modern. Dalam banyak kasus, aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Wilayah Sumatera menjadi contoh nyata bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang masif, khususnya oleh sektor bisnis, berkontribusi terhadap bencana di lima tahun terakhir seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta degradasi ekosistem (Suyanto et al., 2004).

Ekspansi ekonomi yang cepat di wilayah tropis sering mengakibatkan ketegangan antara kepentingan bisnis jangka pendek dan kapasitas lingkungan jangka panjang. Sumatera memiliki hutan hujan tropis, lahan gambut, dan keanekaragaman hayati yang tinggi telah menjadi lokasi konflik konversi lahan untuk perkebunan (khususnya kelapa sawit dan pulpwood), penambangan, dan infrastruktur telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap lintas batas, banjir, dan longsor (Gaveau et al., 2014).

Bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menimbulkan korban besar dari segi nyawa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian sosial dan ekonomi (Environmental Degradation in Spotlight in Sumatra Floods - Society - The Jakarta Post, n.d.). Tanpa mempertanyakan peran perubahan iklim dan cuaca ekstrem, banyak pengamat mengaitkan skala tragedi ini dengan hilangnya tutupan hutan dalam skala besar akibat aktivitas bisnis manusia, salah satunya deforestasi, konversi lahan, dan pengelolaan hutan secara masif untuk industri (nikson.sinaga@kompas.com, 2025).

Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan publik dan akan di bahas dalam tulisan ini adalah PT Toba Pulp Lestari. Tuduhan menyebut bahwa sebagian konsesi hutan tanaman industri (HTI) TPL, terutama untuk bahan baku pulp/kertas/tissue berkontribusi terhadap deforestasi di daerah aliran sungai (DAS) dan hilangnya fungsi penahan air alami di hutan. Sementara itu, perusahaan membela bahwa operasional mereka telah memenuhi standar dimana area konsesi sebagian besar diklaim sebagai kawasan konservasi atau lindung, dan hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk eucalyptus (Polemik PT Toba Pulp Dituding Penyebab Banjir Sumatra, n.d.).

Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan contoh paling jelas. Pembakaran lahan sering dipilih karena murah dan cepat, tetapi menghasilkan bencana asap yang berdampak lintas wilayah bahkan lintas negara. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi jangka pendek mengalahkan kepentingan ekologis dan sosial jangka panjang. (Tacconi, 2016)

Sejumlah studi sebelumnya telah membahas CSR sebagai kewajiban hukum maupun sebagai strategi keberlanjutan perusahaan, namun sebagian besar masih menekankan aspek kepatuhan formal dan manfaat reputasional bagi korporasi. Penelitian-penelitian tersebut relatif kurang mengkaji CSR dari perspektif kegagalan pengelolaan kolektif sumber daya alam, khususnya dengan menggunakan kerangka *tragedy of the commons*. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan kajian terkait efektivitas CSR dalam mencegah eksploitasi berlebihan sumber daya alam akibat lemahnya tata kelola dan penegakan hukum.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan CSR di Indonesia dalam kaitannya dengan degradasi lingkungan melalui

perspektif *tragedy of the commons*. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi keterbatasan CSR dalam praktik bisnis serta faktor-faktor struktural yang menyebabkan CSR belum mampu menekan dampak ekologis secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bencana banjir yang terjadi di Sumatera sebagai dampak dari aktivitas bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Dengan menggunakan kerangka *Tragedy of the Commons*, penelitian ini menjelaskan bagaimana kepentingan ekonomi perusahaan seperti perkebunan, kehutanan industri, pertambangan, dan proyek energi mendorong eksploitasi hutan, lahan gambut, dan daerah aliran sungai tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga menimbulkan kerugian kolektif bagi masyarakat. Selain itu, melalui perspektif *Corporate Social Responsibility (CSR)*, tulisan ini mengkaji tanggung jawab etis dan sosial perusahaan dalam mencegah kerusakan lingkungan serta menilai kesenjangan antara komitmen CSR yang diklaim dengan praktik operasional di lapangan.

Kontribusi kajian ini terletak pada penguatan perspektif konseptual dalam memahami CSR tidak hanya sebagai kewajiban korporasi, tetapi sebagai bagian dari sistem pengelolaan sumber daya alam yang menuntut regulasi yang tegas, mekanisme kolektif, dan akuntabilitas yang lebih kuat. Temuan kajian ini diharapkan dapat memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan, praktik bisnis berkelanjutan, serta penguatan kerangka hukum perlindungan lingkungan di Indonesia.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Tragedy Of The Commons**

*Tragedy of the Commons* pertama kali diperkenalkan oleh Garrett Hardin pada tahun 1968. Hardin (1968) menjelaskan bahwa ketika sumber daya bersifat milik bersama, setiap individu atau kelompok akan cenderung mengeksploitasinya secara berlebihan demi kepentingan pribadi, karena manfaat diperoleh secara langsung sementara kerugian ditanggung bersama oleh masyarakat luas (Hardin, 1968).

Hardin menekankan bahwa rasionalitas individu justru dapat menghasilkan irasionalitas kolektif. Tanpa batasan etika dan institusional, sumber daya bersama akan mengalami degradasi hingga akhirnya menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Pandangan ini kemudian diperkaya oleh Elinor Ostrom, yang menunjukkan bahwa kehancuran *commons* bukanlah sesuatu yang tidak terhindarkan, melainkan bergantung pada tata kelola dan norma yang mengatur perilaku para pengguna sumber daya (Ostrom, n.d.).

Teori *Tragedy of the Commons* memberikan kerangka yang kuat untuk memahami hubungan antara aktivitas bisnis dan bencana lingkungan di Sumatera. Eksploitasi sumber daya alam yang bersifat milik bersama, tanpa pengelolaan dan etika bisnis yang memadai, menyebabkan degradasi lingkungan dan bencana berulang. Oleh karena itu, solusi atas masalah ini tidak hanya terletak pada aspek teknis dan regulasi, tetapi juga pada penguatan etika bisnis, tanggung jawab korporasi, dan kesadaran kolektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

### **Corporate Social Responsibility (CSR)**

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah konsep yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas bisnisnya. Carroll (1991) menjelaskan bahwa CSR mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropis, yang harus dijalankan secara simultan agar perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan (Carroll, 1991).

Secara normatif, keadilan dan perlindungan hukum bagi pemegang saham tidak hanya diwujudkan melalui kepastian hak dan tata kelola internal perusahaan, tetapi juga

melalui penerapan CSR dan tanggung jawab lingkungan. Praktik bisnis yang mengabaikan aspek lingkungan berpotensi menciptakan risiko hukum dan ekonomi jangka panjang yang merugikan pemegang saham, sehingga CSR dapat dipandang sebagai instrumen keadilan substantif dalam melindungi kepentingan pemegang saham lintas generasi (Mustaqim & Satory, 2019).

Konsep CSR berkembang seiring meningkatnya kesadaran bahwa aktivitas bisnis sering menimbulkan eksternalitas negatif, seperti pencemaran lingkungan dan ketimpangan sosial. Dalam konteks lingkungan, CSR berfungsi sebagai mekanisme etis untuk mendorong perusahaan agar menginternalisasi dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial-ekologis yang lebih luas dan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya (Bansal & Roth, 2000).

### **Penelitian Terdahulu**

Kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam yang bersifat common pool resources, yaitu sumber daya yang digunakan secara bersama oleh masyarakat, seperti hutan, daerah aliran sungai, wilayah pesisir, dan badan air. Dalam perspektif tragedy of the commons, kondisi ini mencerminkan perilaku aktor bisnis yang mengeksploitasi sumber daya bersama secara berlebihan demi kepentingan ekonomi privat, sementara biaya ekologis dan sosialnya ditanggung oleh masyarakat luas. Degradasi lingkungan yang diuraikan dalam penelitian Eka Afrina Djamhari et al. (2024), dimana dijelaskan bahwa aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel di Indonesia telah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air laut dan air tanah, serta rusaknya ekosistem di wilayah sekitar tambang.. Selain itu, penelitian Eka Afrina Djamhari et al. (2024) juga menyoroti secara implisit keterbatasan implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam merespons dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri. CSR yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan umumnya berfokus pada bantuan sosial dan ekonomi jangka pendek, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, pemberian beasiswa, atau penciptaan lapangan kerja. Namun, upaya tersebut tidak sebanding dengan skala kerusakan lingkungan yang terjadi dan tidak menyentuh akar permasalahan ekologis, seperti pemulihan hutan, perlindungan daerah aliran sungai, dan pencegahan degradasi lahan. Dalam konteks banjir, CSR semacam ini gagal berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko lingkungan dan lebih berperan sebagai alat legitimasi sosial perusahaan (Eka Afrina Djamhari et al., 2024).

Penelitian Meijaard et al. (2020) memberikan dasar konseptual yang kuat tentang bagaimana pengelolaan sumber daya bersama (hutan dan kawasan lindung) memengaruhi kondisi lingkungan dan risiko bencana. Studi ini menunjukkan bahwa degradasi hutan, yang sering dipicu oleh tekanan ekonomi dan aktivitas bisnis di sekitar kawasan hutan, berkontribusi terhadap menurunnya fungsi ekologis hutan, termasuk kemampuan hutan dalam mengatur tata air dan melindungi daerah aliran sungai. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan meningkatnya kerentanan wilayah terhadap banjir. Dalam perspektif tragedy of the commons, penelitian ini menegaskan bahwa ketika sumber daya hutan sebagai milik bersama tidak dikelola secara efektif, baik karena eksploitasi berlebihan oleh aktor ekonomi maupun lemahnya tata kelola, maka kerusakan lingkungan menjadi tidak terhindarkan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Sementara itu, dari sudut pandang Corporate Social Responsibility (CSR), penelitian ini secara implisit menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan belum cukup efektif apabila tidak diiringi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan berbasis pencegahan risiko ekologis (Meijaard et al., 2021).

Penelitian Irfan et al. (2024) memberikan dasar ilmiah yang kuat tentang hubungan

antara aktivitas bisnis manusia, degradasi ekosistem gambut, dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis, termasuk banjir. Studi ini menjelaskan bahwa pembangunan kanal dan drainase gambut yang umumnya dilakukan untuk kepentingan perkebunan dan aktivitas ekonomi menurunkan permukaan air tanah gambut secara signifikan. Gambut yang mengering kehilangan fungsi alamnya sebagai penyimpan dan pengatur air, sehingga ketika musim hujan datang, air tidak lagi terserap optimal dan meningkatkan potensi banjir. Kondisi ini mencerminkan *Tragedy of the Commons*, di mana gambut sebagai sumber daya bersama dieksploitasi oleh banyak aktor bisnis tanpa pengelolaan kolektif yang berkelanjutan, sehingga menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang luas. Selain itu, penelitian ini relevan dalam kerangka *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena menunjukkan bahwa kerusakan hidrologi gambut bukan sekadar fenomena alam, melainkan konsekuensi dari lemahnya tanggung jawab lingkungan dalam praktik bisnis. Temuan tentang ambang batas kritis permukaan air tanah ( $-0,45 \pm 0,09$  m) menegaskan bahwa pencegahan bencana baik kebakaran maupun banjir memerlukan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam menjaga fungsi ekologis gambut melalui pengelolaan air, restorasi, dan pencegahan kanal berlebih (Irfan et al., 2024).

Penelitian Terzano et al. (2023) menjelaskan bagaimana aktivitas bisnis manusia seperti pembukaan lahan perkebunan, drainase gambut, dan konversi hutan merusak ekosistem gambut yang berfungsi sebagai sumber daya bersama (*common pool resources*) dan pengatur tata air alami. Studi ini menunjukkan bahwa degradasi gambut secara signifikan mengurangi kemampuan lanskap menyimpan air, sehingga meningkatkan risiko banjir di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Kondisi ini mencerminkan *Tragedy of the Commons*, ketika pemanfaatan lahan oleh banyak aktor ekonomi dilakukan tanpa pengelolaan kolektif yang memadai, menyebabkan kerugian ekologis dan sosial yang ditanggung Bersama. Selain itu, penelitian ini dalam melihat *Corporate Social Responsibility (CSR)* mengungkapkan kesenjangan antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Temuan bahwa hanya sekitar 15,6% lahan gambut yang seharusnya dilindungi benar-benar berada dalam kawasan konservasi menandakan lemahnya komitmen dan implementasi CSR, baik oleh perusahaan maupun kebijakan publik. Dengan memetakan kebutuhan konservasi, restorasi, dan pertanian berkelanjutan secara spasial, studi ini menyediakan dasar empiris untuk menilai sejauh mana praktik bisnis telah mengabaikan tanggung jawab sosial-lingkungan dan berkontribusi pada meningkatnya risiko banjir (Terzano et al., 2023).

Pada artikel laporan *Environmental Paper Network et al. (2023)* menjelaskan keterkaitan antara aktivitas bisnis ekstraktif, kerusakan lingkungan, dan risiko bencana ekologis yang relevan dengan fenomena banjir. Laporan ini mendokumentasikan deforestasi skala besar di Kalimantan akibat rantai pasok industri pulp dan kertas di Indonesia, menggunakan data citra satelit, pelacakan rantai pasok, serta pemetaan struktur korporasi. Hilangnya hutan alam sebagai *common pool resources* akibat eksploitasi oleh banyak aktor bisnis mencerminkan logika *Tragedy of the Commons*, di mana kepentingan ekonomi jangka pendek mengorbankan fungsi ekologis hutan sebagai pengatur tata air, yang pada akhirnya meningkatkan kerentanan banjir. Selain itu, laporan ini relevan dalam kerangka *Corporate Social Responsibility (CSR)* karena menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen “*No Deforestation*” yang diklaim perusahaan dengan praktik nyata di lapangan. Lemahnya pengawasan, kompleksitas struktur perusahaan, dan terbatasnya akuntabilitas CSR memperlihatkan bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak dijalankan secara efektif (*Environmental Paper Network et al., 2023*).

Beberapa penelitian diatas relevan sebagai pijakan konseptual dan empiris dalam penelitian banjir akibat aktivitas bisnis manusia melalui pendekatan *Tragedy of the*

Commons dan CSR. CSR memformalkan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder non-pemegang saham termasuk masyarakat lokal dan lingkungan. Dalam praktiknya, CSR bisa berupa kebijakan konservasi, program kemitraan masyarakat (inti-plasma), komitmen no-deforestation, serta laporan keberlanjutan. Namun penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim CSR (sustainability pledges) dan praktik di lapangan jika pengawasan dan mekanisme akuntabilitas lemah. CSR juga dapat mempengaruhi perilaku karyawan (mis. environmental citizenship), sehingga berperan sebagai rantai penting antara kebijakan korporasi dan tindakan di lapangan (Dewi & Soemantri, 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah mengungkap keterkaitan antara aktivitas bisnis ekstraktif, degradasi common pool resources, dan meningkatnya risiko banjir melalui perspektif tragedy of the commons, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara spesifik mengaitkan kegagalan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan dinamika eksploitasi sumber daya bersama pada tingkat korporasi tertentu. Studi-studi sebelumnya umumnya menyoroti dampak lingkungan dan lemahnya tata kelola sumber daya alam secara makro, namun belum mengkaji secara mendalam bagaimana CSR perusahaan kehutanan dan pulp seperti PT Toba Pulp Lestari beroperasi sebagai instrumen administratif dan legitimasi sosial yang tidak menyentuh akar degradasi ekologis di daerah aliran sungai dan kawasan hutan Sumatera. Selain itu, hubungan kausal antara praktik penggunaan lahan korporasi, kegagalan CSR substantif, dan berulangnya bencana banjir masih kurang dianalisis secara terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah peran CSR dalam konteks tragedy of the commons melalui studi kasus PT Toba Pulp Lestari, guna menjelaskan bagaimana eksploitasi sumber daya bersama berkontribusi terhadap meningkatnya kerentanan banjir di Sumatera.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini untuk memahami secara mendalam keterkaitan antara aktivitas bisnis, eksploitasi sumber daya alam, dan meningkatnya risiko bencana banjir di Sumatera. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara kontekstual dan komprehensif, dengan menempatkan aktivitas bisnis perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dalam kerangka sosial, ekologis, dan institusional yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, banjir dianalisis tidak sebagai peristiwa alam semata, tetapi sebagai konsekuensi struktural dari praktik pemanfaatan sumber daya bersama (common pool resources) yang tidak berkelanjutan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang relevan, antara lain laporan akademik, jurnal ilmiah, laporan organisasi lingkungan, dokumen kebijakan pemerintah, laporan keberlanjutan (sustainability report) perusahaan, serta publikasi media dan laporan investigatif terkait deforestasi, pengelolaan hutan tanaman industri, dan bencana banjir di Sumatera. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan hasil penelitian terdahulu yang membahas degradasi hutan, lahan gambut, daerah aliran sungai, serta keterbatasan implementasi CSR di sektor berbasis sumber daya alam. Teknik ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat struktural, historis, dan lintas sektor, sehingga membutuhkan triangulasi informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif-deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu hubungan antara aktivitas bisnis,

deforestasi, degradasi lingkungan, dan risiko banjir. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan kerangka Tragedy of the Commons untuk menjelaskan bagaimana eksploitasi sumber daya alam yang bersifat milik bersama dilakukan secara berlebihan oleh aktor bisnis demi kepentingan ekonomi privat, sementara dampak ekologis dan sosialnya ditanggung oleh masyarakat luas.

Selain itu, analisis juga menggunakan perspektif Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menilai sejauh mana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dijalankan secara substantif atau justru bersifat simbolik. Dengan mengaitkan temuan empiris dan literatur dengan kedua kerangka tersebut, penelitian ini menafsirkan banjir sebagai hasil dari kegagalan tata kelola sumber daya bersama dan lemahnya integrasi CSR ke dalam strategi inti perusahaan. Hasil analisis kemudian disusun secara naratif untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara praktik bisnis, degradasi ekosistem, dan meningkatnya kerentanan bencana di Sumatera.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada akhir November 2025, tiga provinsi di pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami banjir besar dan longsor skala luas yang memakan seribu lebih korban jiwa, merusak pemukiman, dan mengguncang infrastruktur. Bencana ini dipicu oleh curah hujan ekstrem yang dipicu oleh Siklon Tropis Senyar, yang menyebabkan sungai-sungai meluap dan lereng bukit runtuh. Namun para ahli dan organisasi lingkungan menilai hanya curah hujan ekstrem saja tidak cukup menjelaskan skala kehancuran; kerusakan ekologis jangka panjang memperparah dampaknya. Para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa bencana banjir bandang ini diperburuk oleh kerusakan di kawasan hulu DAS (Daerah Aliran Sungai). Hutan yang rusak akibat deforestasi dan tata guna lahan berubah tidak lagi mampu menyerap air hujan secara efektif, sehingga limpasan air meningkat drastis, mempercepat erosi tanah, dan memicu longsor serta banjir yang jauh lebih parah (Agungnoe, 2025).

Organisasi lingkungan Walhi juga mencatat bahwa antara 2016 dan 2025, sekitar 1,4 juta hektar tutupan hutan hilang di tiga provinsi terdampak karena alih fungsi lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur, yang melemahkan sistem hidrologi alam dan memperburuk dampak banjir. (Environmental Degradation in Spotlight in Sumatra Floods - Society - The Jakarta Post, n.d.) Pemerintah Indonesia telah menangguk operasi beberapa perusahaan yang terkait dengan kerusakan lingkungan di kawasan hulu sungai yang terdampak banjir, dan tengah melakukan audit lingkungan terhadap aktivitas mereka untuk mengetahui apakah praktik mereka meningkatkan risiko banjir dan longsor. Berikut beberapa perusahaan yang banyak disorot di media sosial maupun media kabar sebagai perusahaan yang dianggap berperan dalam kerusakan ekosistem dalam memperparah bencana di wilayah Sumatera tersebut, yaitu PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, PT Perkebunan Nusantara (PTPN III). Penelitian ini akan berfokus pada salah satu perusahaan yaitu PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Investigasi jaringan lingkungan internasional menyoroti bahwa perusahaan pulp global seperti Royal Golden Eagle dengan salah satu unit usahanya di Indonesia yang salah satunya adalah PT Toba Pulp Lestari terus diasosiasikan dengan deforestasi hutan tropis, meskipun RGE mengklaim telah memiliki kebijakan nol deforestasi sejak 2015 (Report Links Paper Giant RGE to Indonesia Deforestation despite Pledges, n.d.). RAN (Rainforest Action Network) menyebut bahwa kegiatan deforestasi PT Toba Pulp Lestari sebagai salah satu perpanjangan tangan perusahaan pulp global (RGE) di Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang “memicu kehancuran ekologis” menjelang bencana banjir

2025 dan menyebabkan kebijakan pemerintah menghentikan sementara operasi Toba Pulp Lestari di Sumatera (New Investigation Exposes MUFG's Financing of Royal Golden Eagle's Deforestation as Indonesia Reels from Deadly Floods - Rainforest Action Network, n.d.).

PT Toba Pulp Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri pulp dan kertas dengan wilayah operasi utama di Provinsi Sumatera Utara, terutama di kawasan Tapanuli, di sekitar Danau Toba dan daerah aliran sungai di sekitarnya. Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Inti Indorayon Utama, yang sejak awal operasinya telah menimbulkan berbagai kontroversi sosial dan lingkungan. Beberapa laporan publik menyebut izin konsesi perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan kini mencapai hampir 168.000 hektar, termasuk area di luar zona HTI yang seharusnya dilindungi. Lahan tersebut digunakan untuk menanam eukaliptus sebagai bahan baku pembuatan pulp dan kertas bagi pasar domestik maupun internasional ("Deforestasi Dan Perusakan Lingkungan Oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL)," 2025).

Wilayah konsesi TPL yang luas bukan hanya mencakup dataran rendah, tetapi juga hulu daerah aliran sungai yang menjadi penyangga hidrologi utama di selatan Danau Toba. Alih fungsi kawasan hutan alam menjadi HTI dengan tanaman monokultur seperti eucalyptus mengubah pola rezim air tanah dan struktur ekosistem setempat. Konversi besar lahan hutan alam di hulu DAS berimplikasi pada berkurangnya kemampuan muka tanah untuk menyerap air hujan dan menahan erosi, sehingga saat curah hujan tinggi, limpasan permukaan meningkat drastis dan memperbesar risiko banjir bandang dan longsor di hilir (DP, n.d.).

Secara formal, kegiatan TPL berada dalam kerangka legal perizinan kehutanan. Namun dalam praktiknya, berbagai kajian akademik, laporan organisasi lingkungan, serta temuan lapangan menunjukkan bahwa aktivitas operasional TPL berkontribusi signifikan terhadap deforestasi dan degradasi lingkungan. Deforestasi yang dimaksud tidak selalu berbentuk pembalakan liar ilegal, melainkan terjadi melalui konversi hutan alam dan hutan sekunder menjadi hutan tanaman monokultur, yang secara ekologis tetap dikategorikan sebagai kehilangan hutan (forest loss).

Sejumlah penelitian teknis mengukur dampak perubahan tutupan lahan di konsesi TPL terhadap parameter lingkungan seperti limpasan permukaan air dan erosi tanah. Sebuah studi di kawasan eukaliptus TPL di sektor Aek Nauli menunjukkan bahwa lahan dengan tutupan HTI menghasilkan limpasan permukaan air yang lebih tinggi dan erosi yang lebih berat dibandingkan vegetasi hutan asli, terutama pada kemiringan lereng yang signifikan. Ini penting karena limpasan permukaan air berlebih dan erosi tanah merupakan faktor yang mempercepat aliran air ke sungai tanpa terserap ke tanah, berkontribusi terhadap banjir bandang dan sedimentasi sungai di hilir. Hasil semacam ini menunjukkan mekanisme ekologis penting yang diduga diperburuk oleh konversi hutan menjadi HTI (Purba & ., 2020).

Dalam teori Tragedy of the Commons, sumber daya yang bersifat bersama (common pool resource) digunakan secara kolektif oleh banyak pihak tanpa kepemilikan eksklusif karena rentan terhadap eksploitasi berlebihan oleh individu atau kelompok yang bertindak demi keuntungan pribadi atau entitasnya sendiri. Dalam kerangka Tragedy of the Commons, hutan dan lahan gambut di Sumatera berfungsi sebagai sumber daya bersama yang dieksploitasi oleh banyak pelaku bisnis. Setiap perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi dari pembukaan lahan, sementara dampak seperti banjir, longsor, dan kabut asap ditanggung oleh masyarakat luas. Tidak adanya pengelolaan kolektif yang kuat menyebabkan eksploitasi berlangsung secara terus-menerus.

Dalam perspektif etika bisnis, Tragedy of the Commons mencerminkan kegagalan



moral dalam pengambilan keputusan korporasi. Etika bisnis menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Eksploitasi sumber daya bersama tanpa memperhatikan keberlanjutan melanggar prinsip tanggung jawab sosial dan keadilan antargenerasi. Holt and Watson (2008) menegaskan bahwa tanpa komitmen etika dan regulasi yang kuat, perusahaan cenderung memindahkan risiko lingkungan kepada masyarakat luas (Holt & Watson, 2008).

Ekosistem hutan dan DAS di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra, adalah contoh klasik commons, dimana hutan menyediakan beragam jasa lingkungan, termasuk penyimpanan karbon, penyangga terhadap erosi, dan kemampuan menyerap serta mengatur aliran air melalui vegetasi dan tanah. Daerah aliran Sungai (DAS) mengatur sirkulasi hidrologi suatu wilayah, menjadi penopang bagi pertanian, penyediaan air bersih, serta mitigasi banjir dan longsor.

Fungsi-fungsi ini, yang seharusnya memperkuat ketahanan ekologis wilayah, akan tergerus bila tutupan hutan menurun drastis. Ahli hidrologi UGM menyatakan bahwa fungsi hutan tropis yang berperan sebagai “spons” seperti menyerap, menahan, dan melepaskan air secara terkendali sangat penting dalam menjaga kestabilan aliran air di DAS. Ketika fungsi ini hilang, kapasitas penyimpanan air hilang pula sehingga limpasan permukaan meningkat tajam saat hujan ekstrem terjadi, meningkatkan risiko banjir dan longsor (Agungnoe, 2025).

Data juga menunjukkan bahwa berdasarkan analisis, deforestasi dalam beberapa dekade terakhir dipicu oleh penebangan hutan yang diperuntukkan dalam penggunaan kayu sebagai bahan baku industri pulp, perluasan perkebunan sawit, aktivitas pertambangan, serta pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan untuk investasi lain. Perubahan tutupan lahan dan deforestasi terjadi secara signifikan dalam zona DAS di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat selama lima tahun terakhir (2019–2024), termasuk di dalam kawasan hutan negara yang terdegradasi menjadi non-hutan (Unews, n.d.).

Fenomena tersebut jika dilihat melalui kerangka tragedy of the commons, peran TPL dapat dipahami bahwa hutan, DAS, dan ekosistem pegunungan merupakan sumber daya bersama yang menopang kehidupan masyarakat luas. Namun, melalui skema konsesi, sumber daya bersama tersebut dimonopoli secara fungsional oleh aktor bisnis untuk kepentingan produksi pulp. Perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi privat dari pemanfaatan kayu, sementara biaya ekologis yang berupa dampak dari aktivitas bisnis tersebut seperti banjir, longsor, krisis air, dan kerusakan ekosistem ditanggung oleh masyarakat dan negara.

Situasi ini mencerminkan tragedi klasik bahwa setiap aktor rasional secara ekonomi terdorong untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, tetapi akumulasi tindakan tersebut justru merusak sistem ekologis yang menopang semua pihak. Bagi investor atau perusahaan membuka hutan berarti memanfaatkan komoditas hasil hutan sebagai bahan baku atau membuka lahan baru yang dapat dijadikan perkebunan dapat menaikkan pendapatan dan profit jangka pendek, namun bagi masyarakat umum hilangnya hutan berarti menurunnya fungsi resapan air, stabilitas tanah, dan kapasitas DAS dalam mengatur aliran air menyebabkan eksternalitas negatif berupa banjir, longsor, dan kerusakan sosial ekonomi yang jauh lebih luas.

Prinsip ekonomi mikro menyatakan bahwa ketika pemilik atau pengguna commons tidak menanggung biaya penuh dari kerusakan yang ditimbulkan, mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya lebih dari tingkat yang berkelanjutan itulah inti tragedy of the commons. Salah satu faktor utama yang memperburuk tragedy of the commons adalah

ketidakefektifan regulasi, penegakan hukum, dan pengawasan atas penggunaan sumber daya hutan dan DAS di Indonesia. Selain itu pengawasan dan regulasi yang tidak efisien menjadikan pelaku bisnis leluasa dalam mengelola sumber daya bersama. Laporan akademik terhadap manajemen DAS di Indonesia mencatat bahwa integrasi lembaga, kebijakan, dan partisipasi stakeholder dalam pengelolaan DAS masih lemah. Akibatnya, perluasan lahan pertanian, pemukiman, dan penggunaan lahan lainnya sering dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip konservasi dan kapasitas ekologis lingkungan (Andi Setyo Pambudi, 2019).

Kegagalan perusahaan dalam menerapkan CSR lingkungan di Sumatera terlihat dari lemahnya pengelolaan lahan, pengabaian risiko kebakaran, dan minimnya rehabilitasi ekosistem. Hal ini menunjukkan bahwa CSR belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam strategi inti perusahaan, melainkan masih dipandang sebagai kewajiban administratif atau pencitraan. (Idemudia, 2011) Ostrom (2000) menegaskan bahwa keberlanjutan sumber daya bersama hanya dapat dicapai jika para aktor, termasuk perusahaan, memiliki komitmen moral dan institusional dalam pengelolaannya (Ostrom, 2000).

Secara teori merupakan tanggung jawab perusahaan untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya, termasuk dimensi etika dan ekologi, bukan sekadar kegiatan amal. CSR yang substantif berarti perusahaan menginternalisasi eksternalitas lingkungan yang artinya dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan diakui dan diminimalkan melalui perubahan kebijakan, teknologi, serta praktik operasional perusahaan. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan menggunakan CSR sebagai alat legitimasi sosial, yaitu untuk memperbaiki citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan (stakeholder legitimacy), tanpa benar-benar mengatasi sumber utama dampak ekologis yang dihasilkan.

Dalam (Nasution and Adhariani, 2016) menyoroti adanya perbedaan antara praktik CSR simbolik dan CSR substantif, di mana strategi simbolik lebih banyak berfokus pada pelaporan CSR dan citra manajemen risiko reputasi, sementara perubahan nyata terhadap kinerja lingkungan sangat minim. Studi dalam konteks pelaporan CSR menemukan bahwa banyak praktik CSR hanya berfungsi untuk menciptakan persepsi positif kepada stakeholder, tetapi tidak menunjukkan dampak yang signifikan pada peningkatan kinerja lingkungan perusahaan secara operasional (Nasution & Adhariani, 2016).

Dalam konteks PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan menjalankan berbagai program CSR yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan di wilayah operasionalnya, salah satunya program CSR di wilayah Parmaksian, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun kritik terhadap CSR TPL menunjukkan bahwa program-program ini lebih mudah terlihat dan dipublikasikan, sementara masalah lingkungan yang jauh lebih besar seperti dampak deforestasi, hilangnya fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan peningkatan risiko bencana seperti banjir kurang disentuh CSR secara substansial (Butar-Butar & Siregar, 2023).

PT Toba Pulp Lestari (TPL) memformalkan tanggung jawab sosialnya sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan. Menurut Sustainability Report perusahaan, TPL mengimplementasikan program Community Development (CD)/CSR dalam lima bidang utama sebagai wujud kontribusi terhadap masyarakat sekitar area operasionalnya. Program ini juga dilaporkan sebagai bagian dari penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lokal (PT Toba Pulp Lestari Tbk, 2024).

Program CSR TPL diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama di wilayah Kecamatan Parmaksian dan sekitarnya. Melalui program pemberdayaan ekonomi, TPL bekerja sama dengan masyarakat dalam penyediaan

pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha, dan penciptaan peluang kerja lokal. Tujuan utamanya adalah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan konsumtif (Alamudi, 2021).

Langkah CSR TPL juga mencakup kontribusi pada bidang pendidikan dan kesehatan, seperti bantuan fasilitas sekolah, pelatihan, serta program kesehatan masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di komunitas lokal yang terdampak operasi perusahaan. (WASPADA, 2022) Sebuah studi menunjukkan bahwa TPL melakukan edukasi masyarakat tentang teknologi ramah lingkungan. Program ini mencakup pengelolaan limbah padat dan cair, serta penggunaan energi terbarukan yang dikomunikasikan kepada penduduk dan pelajar setempat (Mutiaras S. Simanjuntak & Juanto Simangunsong, 2024).

Penelitian akademik juga menunjukkan bahwa CSR TPL berjalan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat sekitar konsesi. Namun kegiatan yang diangkat lebih banyak berorientasi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat, sementara isu ekologis yang lebih langsung terkait dampak industri seperti restorasi hutan dan mitigasi risiko hidrologis belum menjadi fokus utama program CSR. Hal ini penting karena isu lingkungan seperti degradasi hutan dan perubahan fungsi DAS sangat relevan dalam konteks risiko bencana seperti banjir di Sumatera. Saran akademik pada literatur CSR menekankan perlunya integrasi isu lingkungan secara substansial dalam strategi CSR perusahaan ekstraktif (Butar-Butar & Siregar, 2023).

CSR perusahaan sering dijalankan secara parsial dan sektoral, tanpa terkoneksi pada mekanisme pengaturan kolektif yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pemantau independen. CSR skala perusahaan saja tidak mampu menggantikan fungsi tata kelola lingkungan yang komprehensif, terutama dalam konteks perbaikan daerah aliran sungai (DAS) dan hidrologi lanskap yang rusak akibat operasi industri.

Walaupun aturan CSR di Indonesia bersifat wajib menurut UU Perseroan Terbatas, implementasi praktiknya cenderung tidak memiliki pengawasan kuat yang memastikan program CSR mengatasi dampak ekologis serius, seperti penurunan daya resap air, erosi, atau pengurangan struktur tutupan hutan di hulu DAS. Hal ini tercermin dari masalah umum di banyak perusahaan, di mana penerapan CSR terhadap lingkungan masih terbatas dan tidak terintegrasi kuat dengan strategi operasional perusahaan serta regulasi pemerintah (Irawan, 2024).

Secara teoretis, *Tragedy of the Commons* menjelaskan bagaimana hutan, daerah aliran sungai, dan lanskap sekitar Danau Toba sebagai sumber daya bersama mengalami degradasi akibat eksploitasi korporasi yang berorientasi pada kepentingan ekonomi privat. CSR, yang secara normatif seharusnya menjadi mekanisme internal untuk membatasi eksploitasi tersebut, dalam praktiknya justru berfungsi lemah dan bersifat simbolik. Sinkronisasi ini menunjukkan bahwa kegagalan CSR bukan sekadar persoalan implementasi teknis, tetapi merupakan bagian dari dinamika tragedi commons itu sendiri, di mana tanggung jawab ekologis tidak terinternalisasi dalam strategi produksi dan penggunaan lahan perusahaan.

Secara praktis, temuan ini menjelaskan mengapa berbagai program CSR PT Toba Pulp Lestari tidak berbanding lurus dengan penurunan risiko banjir di wilayah Sumatera. CSR yang berfokus pada bantuan sosial, pembangunan infrastruktur umum, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak menyentuh akar permasalahan ekologis berupa kerusakan hutan dan terganggunya fungsi hidrologis daerah aliran sungai. Dengan mengaitkan teori tragedi commons secara langsung pada praktik CSR perusahaan, penelitian ini menegaskan bahwa mitigasi banjir hanya dapat dicapai apabila CSR diarahkan pada pembatasan eksploitasi sumber daya bersama, pemulihan fungsi ekosistem,

dan pengelolaan tata air berbasis lanskap. Sinkronisasi ini memberikan dasar konseptual sekaligus operasional bagi perumusan kebijakan CSR yang tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi sosial, tetapi sebagai instrumen pencegahan bencana ekologis.

## **KESIMPULAN**

Bencana banjir besar yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat faktor alam atau cuaca ekstrem. Banjir tersebut merupakan konsekuensi struktural dari degradasi lingkungan jangka panjang yang dipicu oleh aktivitas bisnis berbasis eksploitasi sumber daya alam, khususnya deforestasi dan perubahan tata guna lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS). Hilangnya tutupan hutan dan degradasi ekosistem telah melemahkan fungsi ekologis hutan sebagai pengatur tata air, sehingga meningkatkan limpasan permukaan, erosi, sedimentasi sungai, serta kerentanan terhadap banjir dan longsor.

Dalam kerangka *Tragedy of the Commons*, hutan, lahan gambut, dan DAS di Sumatera berfungsi sebagai *common pool resources* yang dimanfaatkan oleh berbagai aktor ekonomi. Aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek mendorong eksploitasi sumber daya tersebut secara berlebihan, sementara biaya ekologis dan sosial berupa banjir, longsor, dan kerugian ekonomi ditanggung oleh masyarakat luas. Penelitian ini menunjukkan bahwa deforestasi tidak selalu terjadi melalui praktik ilegal, melainkan juga melalui mekanisme legal seperti konsesi hutan tanaman industri (HTI) yang secara struktural gagal melindungi fungsi ekologis hutan.

Sebagai salah satu perusahaan yang banyak menggunakan bahan baku yang bersumber dari alam, PT Toba Pulp Lestari diposisikan sebagai salah satu aktor penting dalam dinamika deforestasi di Sumatera Utara. Model bisnis pulp berbasis HTI yang dijalankan perusahaan mendorong konversi hutan alam dan hutan sekunder menjadi tanaman monokultur seperti eucalyptus. Meskipun beroperasi dalam kerangka perizinan formal, konversi tersebut secara ekologis tetap merupakan kehilangan hutan yang berdampak pada menurunnya daya serap air, meningkatnya limpasan permukaan, serta melemahnya fungsi DAS. Kondisi ini memperbesar risiko bencana hidrometeorologis di wilayah hilir, termasuk banjir bandang dan longsor.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan TPL belum mampu berfungsi sebagai instrumen koreksi atas kerusakan ekologis yang terjadi. Program CSR perusahaan cenderung berfokus pada aspek sosial-ekonomi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, yang meskipun memiliki manfaat langsung, tidak sebanding dengan skala dan sifat kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas bisnis. Minimnya CSR berbasis restorasi DAS, rehabilitasi hutan, dan pemulihan fungsi hidrologis menunjukkan bahwa CSR masih dijalankan secara simbolik dan reaktif, bukan sebagai strategi pencegahan risiko lingkungan yang terintegrasi dalam inti operasional perusahaan.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan bisnis yang tidak dijalankan bersamaan dengan CSR yang tidak hanya terfokus pada aspek sosial dan ekonomi, namun juga pada aspek ekologis, degradasi ekosistem tidak hanya berlanjut, tetapi juga terakumulasi menjadi risiko bencana yang bersifat struktural. CSR tanpa pengaturan kolektif yang kuat melalui regulasi, penegakan hukum, pengawasan independen, dan partisipasi Masyarakat tidak mampu menghentikan eksploitasi sumber daya bersama. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus berlangsung hingga mencapai titik kritis, di mana gangguan alam seperti hujan ekstrem memicu bencana berskala besar yang menyebabkan lebih dari 1.000 nyawa menghilang pada bencana di Sumatera akhir November 2025 lalu.

Penelitian ini menegaskan bahwa banjir di Sumatera merupakan manifestasi dari kegagalan tata kelola sumber daya alam dan kegagalan internalisasi eksternalitas lingkungan dalam praktik bisnis. Solusi atas permasalahan ini tidak cukup hanya mengandalkan CSR sebagai kegiatan filantropi pascabencana, tetapi memerlukan perubahan struktural dalam model bisnis, penguatan regulasi lingkungan, serta integrasi CSR yang substantif dan berbasis restorasi ekosistem. Tanpa perubahan tersebut, eksploitasi sumber daya alam akan terus menghasilkan keuntungan privat jangka pendek, sementara masyarakat terus menanggung kerugian ekologis dan sosial dalam jangka panjang.

Pengalaman banjir besar di Sumatra menunjukkan bahwa persoalan bencana tidak dapat dipisahkan dari tata kelola sumber daya alam dan praktik bisnis yang berlangsung di wilayah hulu daerah aliran sungai. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu diarahkan pada penguatan pengaturan kolektif yang berbasis ekosistem, khususnya melalui pengetatan izin usaha berbasis lahan, pengawasan yang lebih transparan, serta integrasi kebijakan kehutanan, tata ruang, dan pengurangan risiko bencana. Tanpa kerangka pengelolaan bersama yang kuat, eksploitasi hutan sebagai common pool resources akan terus berlanjut dan memperlemah fungsi ekologis hutan sebagai penyangga hidrologis. Dalam konteks ini, perusahaan seperti PT Toba Pulp Lestari tidak cukup hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga perlu ditempatkan dalam sistem akuntabilitas lingkungan yang memastikan bahwa dampak kumulatif aktivitas bisnis terhadap degradasi hutan dan DAS benar-benar dikendalikan.

Di sisi lain, implikasi praktis bagi dunia usaha adalah perlunya reorientasi Corporate Social Responsibility (CSR) dari pendekatan simbolik menuju CSR yang substantif dan preventif. CSR seharusnya tidak berhenti pada bantuan sosial atau program pemberdayaan ekonomi jangka pendek, melainkan diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis melalui restorasi hutan dan DAS, pengendalian erosi, serta mitigasi risiko banjir dan longsor. Tanpa integrasi CSR dengan kebijakan lingkungan yang mengikat dan pengawasan independen, CSR tidak mampu menginternalisasi eksternalitas lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis. Akibatnya, kerusakan ekosistem terus terakumulasi dan pada akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk bencana struktural yang merugikan masyarakat luas, sebagaimana tercermin dalam banjir Sumatra 2025.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agungnoe. (2025, December 1). Bencana Banjir Bandang Sumatra, Pakar UGM Sebut Akibat Kerusakan Ekosistem Hutan di Hulu DAS. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/>.
- Alamudi, A. A. (2021, July 6). Disebut Sebagai Perusak Lingkungan, Ini yang Dilakukan TPL. idntimes. <https://sumut.idntimes.com/news/sumatera-utara/disebut-sebagai-perusak-lingkungan-ini-yang-telah-dilakukan-tpl-00-hz1ln-gl1qc9>.
- Andi Setyo Pambudi. (2019). Watershed Management in Indonesia: A Regulation, Institution, and Policy Review. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 3(2), 185–202. <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.74>
- Bansal, P., & Roth, K. (2000). WHY COMPANIES GO GREEN: A MODEL OF ECOLOGICAL RESPONSIVENESS. *Academy of Management Journal*, Vol, 43. No. 4, 717-736. <https://doi.org/10.5465/1556363>.
- Butar-Butar, J., & Siregar, O. M. (2023). Effectiveness Analysis Of The Corporate Social Responsibility (CSR) Program Of Pt. Toba Pulp Lestari Tbk For Improving The Welfare And Quality Of Human Resources At Parmaksian District Society. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, 3(03), 89–97. <https://doi.org/10.58471/jecombi.v3i03.51>.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral

- management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34(4), 39–48. [https://doi.org/10.1016/0007-6813\(91\)90005-G](https://doi.org/10.1016/0007-6813(91)90005-G)
- Deforestasi dan Perusakan Lingkungan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL). (2025, July 7). Suara Nauli. <https://suaranauli.com/2025/07/07/deforestasi-dan-perusakan-lingkungan-oleh-pt-toba-pulp-lestari-tpl/>.
- Dewi, F. N., & Soemantri, R. (2025). The impact of CSR disclosure, audit committees, independent commissioners, and managerial ownership on corporate value: An empirical study of basic materials sector companies listed on the Indonesian stock exchange. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 8(1), 48–63. <https://doi.org/10.24198/jaab.v8i1.59371>
- DP, A. O. (n.d.). Jejak TPL di BANJIR SUMATERA: Dari Konsesi Raksasa, Penanaman Eucalyptus, hingga Rangkaian BENCANA EKOLOGIS di SUMUT - Indotren. Jejak TPL di BANJIR SUMATERA: Dari Konsesi Raksasa, Penanaman Eucalyptus, hingga Rangkaian BENCANA EKOLOGIS di SUMUT - Indotren. Retrieved December 20, 2025, from <https://www.indotren.com/kabar/32216375617/jejak-tpl-di-banjir-sumatera-dari-konsesi-raksasa-penanaman-eucalyptus-hingga-rangkaian-bencana-ekologis-di-sumut>
- Eka Afrina Djamhari, Ricko Nurmansyah, Dwi Rahayu Ningrum, Eksanti Amalia Kusuma Wardhani, Herni Ramdhaningrum, Victoria Fanggidae, Ah Maftuchan, Irvan T. Harja, & Andri Prasetyo. (2024). Tracking Financing Footprints: Environmental and Social Impacts of the Nickel Industry in Indonesia. *Perkumpulan Prakarsa*, 144.
- Environmental degradation in spotlight in Sumatra floods—Society—The Jakarta Post. (n.d.). Retrieved December 10, 2025, from <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/12/04/environmental-degradation-in-spotlight-in-sumatra-floods.html>.
- Environmental Paper Network, Greenpeace International, Yayasan Auriga Nusantara, Woods and Wayside International, & Rainforest Action Network. (2023). *Pulping Borneo: Deforestation in the RGE Group's supply chain and RGE's hidden links to a new mega-scale pulp mill in North Kalimantan, Indonesia*.
- Gaveau, D. L. A., Salim, M. A., Hergoualc'h, K., Locatelli, B., Sloan, S., Wooster, M., Marlier, M. E., Molidena, E., Yaen, H., DeFries, R., Verchot, L., Murdiyarso, D., Nasi, R., Holmgren, P., & Sheil, D. (2014). Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during non-drought years: Evidence from the 2013 Sumatran fires. *Scientific Reports*, 4(1), 6112. <https://doi.org/10.1038/srep06112>.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons: The population problem has no technical solution; it requires a fundamental extension in morality. *Science*, 162(3859), 1243–1248. <https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>.
- Holt, D., & Watson, A. (2008). Exploring the dilemma of local sourcing versus international development – the case of the flower industry. *Business Strategy and the Environment*, 17(5), 318–329. <https://doi.org/10.1002/bse.623>.
- Idemudia, U. (2011). Corporate social responsibility and developing countries: Moving the critical CSR research agenda in Africa forward. *Progress in Development Studies*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.1177/146499341001100101>.
- Irawan, D. (2024). TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) KEWAJIBAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPERASI DAN KEBERLANJUTAN BISNIS PERUSAHAAN. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.59407/jdedte.v1i1.471>
- Irfan, M., Koriyanti, E., Saleh, K., Hadi, Safrina, S., Awaludin, Sulaiman, A., Akhsan, H., Suhadi, Suwignyo, R. A., Choi, E., & Iskandar, I. (2024). Dynamics of Peatland Fires in South Sumatra in 2019: Role of Groundwater Levels. *Land*, 13(3), 373. <https://doi.org/10.3390/land13030373>.
- Meijaard, E., Santika, T., Wilson, K. A., Budiharta, S., Kusworo, A., Law, E. A., Friedman, R., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., Sherman, J., St. John, F. A. V., & Struebig, M. J. (2021). Toward improved impact evaluation of community forest management in Indonesia. *Conservation Science and Practice*, 3(1), e189. <https://doi.org/10.1111/csp2.189>.
- Mustaqim, M., & Satory, A. (2019). *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan*

- Terbatas Tertutup dan Keadilan Berdasar Pancasila. *SASI*, 25(2), 199. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i2.222>
- Mutiara S. Simanjuntak & Juanto Simangunsong. (2024). Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan di Perusahaan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk untuk Edukasi Masyarakat. *Indonesia Bergerak: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 34–42. <https://doi.org/10.61132/inber.v2i3.487>.
- Nasution, R. M., & Adhariani, D. (2016). SIMBOLIS ATAU SUBSTANTIF? ANALISIS PRAKTIK PELAPORAN CSR DAN KUALITAS PENGUNGKAPAN. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 23–51. <https://doi.org/10.21002/jaki.2016.02>
- New Investigation Exposes MUFG's Financing of Royal Golden Eagle's Deforestation as Indonesia Reels from Deadly Floods—Rainforest Action Network. (n.d.). Retrieved December 19, 2025, from <https://www.ran.org/press-releases/new-investigation-exposes-mufgs-financing-of-royal-golden-eagles-deforestation-as-indonesia-reels-from-deadly-floods/>.
- nikson.sinaga@kompas.com, N. S.-. (2025, June 5). Calls to Close PT Toba Pulp Lestari Widen, Triggered by Ecological Damage and Social Conflict. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/en-jutaan-warga-serukan-tutup-pt-toba-pulp-lestari-di-hari-lingkungan-hidup-sedunia>.
- Ostrom, E. (2000). Collective Action and the Evolution of Social Norms. *Journal of Economic Perspectives*, Volume 14, Number 3—Summer 2000. <https://doi.org/10.1257/jep.14.3.137>
- Ostrom, E. (n.d.). *Governing The Commons*.
- Polemik PT Toba Pulp Dituding Penyebab Banjir Sumatra: Luhut Buka Suara. (n.d.). Retrieved December 10, 2025, from <https://www.mediaindonesia.asia/2025/12/polemik-pt-toba-pulp-dituding-penyebab.html>.
- PT Toba Pulp Lestari Tbk. (2024). FROM FOREST TO FUTURE RESPONSIBILITY (Sustainability Report) [Sustainability Report].
- Purba, T., & . S. (2020). The Run Off and Erosion on Eucalyptus Plantation Pt. Toba Pulp Lestari Aek Nauli Sector Simalungun District. *International Journal of Scientific Research and Management*, 8(03), 285–288. <https://doi.org/10.18535/ijstrm/v8i03.ah01>
- Report links paper giant RGE to Indonesia deforestation despite pledges. (n.d.). Retrieved December 19, 2025, from <https://news.mongabay.com/2023/07/report-links-paper-giant-rge-to-indonesia-deforestation-despite-pledges/>.
- Suyanto, Unna Chokkalingam, & Prianto Wibowo. (2004). Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi. Center for International Forestry Research.
- Tacconi, L. (2016). Preventing fires and haze in Southeast Asia. *Nature Climate Change*, 6(7), 640–643. <https://doi.org/10.1038/nclimate3008>.
- Terzano, D., Trezza, F. R., Rezende, M., Malatesta, L., Lew Siew Yan, S., Parish, F., Moss, P., Bresciani, F., Cooke, R., Dargusch, P., & Attorre, F. (2023). Prioritization of peatland restoration and conservation interventions in Sumatra, Kalimantan and Papua. *Journal for Nature Conservation*, 73, 126388. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2023.126388>
- Unews, S. (n.d.). Banjir dan Longsor di Sumatra: Jejak Deforestasi, Konsesi Hutan, dan Pertanyaan atas Peran Korporasi - Unews. Banjir dan Longsor di Sumatra: Jejak Deforestasi, Konsesi Hutan, dan Pertanyaan atas Peran Korporasi - Unews. Retrieved December 20, 2025, from <https://www.unews.id/news/28816418817/banjir-dan-longsor-di-sumatra-jejak-deforestasi-konsesi-hutan-dan-pertanyaan-atas-peran-korporasi>.
- WASPADA. (2022, April 29). TPL Salurkan Rp15 M Dana CSR Setiap Tahunnya. WASPADA. <https://www.waspada.id/sumut/tpl-salurkan-rp15-m-dana-csr-setiap-tahunnya/>.